

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

PETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 3 No 2, Juli 2018

Susunan Redaksi

Penanggungjawab

Iwan Setya Putra

Pemimpin Editor

Sulistya Dewi Wahyuningsih

Sekretaris Editor

Yuyung Rizka Aneswari

Dewan Editor

Siti Sunrowiyati

Retno Murnisari

Manajemen

Hanif Yusuf Seputro

Regi Sura Esa Pratama

Sura Klaudia

Alamat Redaksi:

Jurnal PETA

Program Studi Akuntansi

STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar

Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788

Email : peta@stieken.ac.id

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

PEETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 3 No 2, Juli 2018

Daftar Isi

Obi Banamtuan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop
Dalam Pemenuhan Kewajiban Pph 21 1-10

Annafi Indra Tama

Evaluasi Kinerja Pelayanan Dan Keuangan Rumah Sakit
Umum Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Blud..... 11-25

Muhammad Mufli, Dikau Tondo Prastyo

Rancang Bangun Sistem Informasi Keuangan Desa (Sikades)
1.0 Berbasis Android 26-48

Vina Putri Utami, Rosita Apriliya Rani, Septi Dwi Azizah

Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Sebagai
Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana
Kebajikan. 49-58

Nabila Sarah Restu Bellinda, Yudhanta Sambharakreshna

Analisis Pemeriksaan Internal Terhadap Pengelolaan Aset
Tetap Dalam Rangka Optimalisasi Pendayagunaan Aset
Tetap. 59-71

Abid Muhtarom, Iskandar

Strategi Pengembangan Program Ekowisata Kabupaten
Lamongan Jawa Timur 72-82

Dewi Agustiya Ningsih, Ani Hayatul Masruroh

Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan Dan
Persediaan Pada Ud. Kelapa Sari 83-92



RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA (SIKADES) 1.0 BERBASIS ANDROID¹

Muhammad Mufli¹
Dikau Tondo Prastyo²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, MT.
Haryono 169, Malang 65145

Surel: mufli.ub@gmail.com

Abstrak. Rancang Bangun Sistem Informasi Keuangan Desa (Sikades) 1.0 Berbasis Android. Kewajiban pembuatan laporan dana desa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi kendala bagi pemerintahan desa karena keterbatasan sumber daya manusia. artikel ini mengajukan rancang bangun SIKADES 1.0 dalam bentuk aplikasi *Platform* Android yaitu Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKADES) 1.0. SIKADES 1.0 dirancang secara terintegrasi yang mendukung kegiatan pengelolaan keuangan seperti pencatatan dan pelaporan. Keberadaan SIKADES 1.0 akan mendukung peningkatan kinerja pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa agar lebih transparan.

Kata Kunci :SIKADES. 1.0, Dana Desa, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Keuangan, Platform Android

Abstract. Design of Village Financial Information System (Sikades) 1.0 Based on Android. The obligation to make village fund reports based on Government Accounting Standards (SAP) is an obstacle for village government because of limited human resources. This article proposes the design of SIKADES 1.0 in the form of an Android Platform application, the Village Financial Information System (SIKADES) 1.0. SIKADES 1.0 is designed in an integrated manner that supports financial management activities such as recording and reporting. The existence of SIKADES 1.0 will support the improvement of the performance of the tasks of the village government apparatus in managing village funds so that they are more transparent.

¹ Artikel dipresentasikan dalam lomba paper Accounting Festival 2018 di STIE Kesuma Negara Blitar dan memperoleh juara pertama

Keywords:SIKADES 1.0, Village Fund, Village Government, Financial Information System, Android Platform

Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu perhatian serius pasca pengesahan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini dikarenakan, setiap desa mendapatkan kucuran dana langsung dari APBN. Dana tersebut menjadi hak pemerintah desa untuk digunakan dalam mendorong pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan. Jumlah nominal dana yang akan masuk ke setiap pemerintah desa akan berbeda karena alokasi dana tersebut akan memperhatikan kondisi geografis, jumlah penduduk, dan angka kematian (Sujarweni, 2015). Pada tahun 2015, dana desa dalam APBN-P 2015 yang mencapai lebih dari Rp 20 triliun. Pada tahun 2016, pemerintah meningkatkan alokasi Dana Desa dalam APBN sebesar Rp 46,98 triliun dan pada tahun 2017, alokasi dana desa kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun. Pada tahun 2018, pemerintah memproyeksikan akan ada peningkatan alokasi dana desa menjadi Rp 120 triliun. Sehingga tiap desa akan mendapat sekitar Rp 1,5 milyar dari total 72.944 desa yang ada di Indonesia.

Pengelolaan dana desa saat ini menjadi perhatian serius karena besarnya jumlah dana yang akan diperoleh oleh setiap desa yakni mencapai 1 miliar per tahun. Hal ini

dikarenakan dana desa berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi dilingkungan pemerintahan desa. Dana desa sangat rentan disalahgunakan oleh aparatur desa yang tidak bertanggungjawab. Laporan masyarakat dan Berdasarkan temuan FITRA Tahun 2016, terdapat 15 Kabupaten yang terindikasi menyalahgunakan alokasi dana desa yang menyebabkan kerugian mencapai Rp. 4,9 Miliar. Hingga hingga Januari 2017, KPK telah menerima sebanyak 362 laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait dana desa dan 87 laporan akan diusut dalam kasus penyimpangan tersebut. Rata-rata modus yang dilakukan aparatur desa adalah pemotongan anggaran, mark up, dan pemalsuan tanda-tangan. Ada juga yang tertangkap karena masalah kesalahan administrasi dan tidak sesuai dengan peruntukan.

Kondisi akan menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Untuk itu, Pemerintah desa dituntut untuk bijak dalam mengelolah dana tersebut secara professional, transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana desa yang profesional, transparan dan akuntabel merupakan cerminan reformasi birokrasi yang dibangun oleh oleh Kementerian Keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan

tugas, dan peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Secara hukum, Pemerintah Desa wajib untuk melaporkan kinerjanya kepada Pemerintah dan masyarakat karena pada dasarnya dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD adalah dana masyarakat. Pemerintah desa wajib melaporkan penggunaan dana tersebut sebagai alat evaluasi kinerja dan wujud implementasi *good govenrnance*. Menurut Syachbrahi (2012), laporan keuangan desa sangatlah penting karena memberikan manfaat bagi pemerintah desa itu sendiri seperti :

- 1) Mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi dan kebermanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran;
- 2) Mengetahui nilai kekayaan bersih yang dimiliki desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan;
- 3) Sebagai alat evaluasi yang lebih informatif tentang kinerja aparatur desa utamanya kepala desa;
- 4) Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki desa;
- 5) Sebagai wujud riil implementasi azas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan model praktis bagi entitas lain.

Pertanggungjawaban pemerintah desa dalam penggunaan dana tersebut adalah melalui Laporan Keuangan. Menurut Syachbrahi (2012) Pelaporan tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat 5 sampai ayat 10 dalam Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban meliputi semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah.

Secara Umum pemerintah telah menetapkan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komposisi laporan keuangan pemerintah desa pada dasarnya mengikuti Laporan Keuangan Pemerintah sesuai PSAP Nomor 01 paragraf 14 yang menyatakan bahwa laporan keuangan terdiri atas :

- 1) Laporan Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
- 2) Laporan Finansial yang meliputi :
 - a) Neraca;
 - b) Laporan Operasional (LO);
 - c) Laporan Arus Kas (LAK);
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada tahun 2014, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan standar baru dalam pembuatan laporan keuangan dilingkungan pemerintah desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa. dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Laporan keuangan yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa menurut peraturan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LRADes) dan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa yang terdiri dari buku kas umum, buku kas harian, buku pembantu pajak, buku pembantu bank dan neraca desa.

Jika ditelaah lebih jauh, Laporan keuangan yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan sebagai standar pelaporan keuangan bagi pemerintahan desa. sehingga dirasa tidak perlu adanya pengembangan standar baru. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang pada umumnya dimiliki pemerintahan desa dalam hal pembuatan laporan keuangan. Namun yang harus menjadi fokus

pemerintah saat ini adalah bagaimana mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan desa yang bisa diadopsi oleh pemerintahan desa diseluruh Indonesia dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 133 Tahun 2014. Sistem ini yang nantinya akan menjadi standar dalam sistem informasi keuangan desa yang bertujuan untuk memudahkan pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa hingga pembuatana laporan keuangan desa.

Pengembangan sistem ini lebih diperlukan mengingat perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan pemerintah telah mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan yang saat ini diterapkan di lingkungan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem tersebut dikembangkan dalam bentuk aplikasi seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Pengembangan aplikasi ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. (Budiriyanto, 2013). Pada tahun 2015, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Daerah atau yang disingkat SIMDA yang merupakan sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya

akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan (SKPKD) ataupun ditingkat akuntansi (SKPD). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. (Nugraha dan Yuli, 2013).

Selain dikembangkan oleh pemerintah, aplikasi sistem keuangan pemerintahan juga dikembangkan oleh pihak swasta. Sebagai contoh PT Solusi Teknologi Informasi mengembangkan aplikasi e-Finance yang merupakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang mengadopsi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sama halnya dengan PT Usadi Sisemindo Intermatika yang mengembangkan V@Lid 49 atau Valid 49. Aplikasi ini merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dibuat untuk menyediakan layanan lengkap pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan daerah. Sistem ini mencakup aplikasi-aplikasi seperti modul perencanaan, anggaran, kas, Akuntansi, Gaji, Pendapatan, dan TUKD Satker sebagai perangkat penunjang manajemen keuangan daerah.

Kelemahan dari sistem informasi pengelolaan dan manajemen keuangan daerah baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta sebagian besar masih menysasar pada pemerintahan di level pemerintah kabupaten/kota,

provinsi ataupun nasional. Selain itu, sistem ini harus berjalan sistem operasi tertutup windows yang berbahasa inggris dan harus menggunakan komputer dekstop ataupun laptop. Hal ini tentu akan membingungkan perangkat desa dalam mengoprasikan aplikasi tersebut karena penggunaan komputer tidaklah mudah. Aplikasi-aplikasi yang ada saat ini membutuhkan biaya investasi yang terbilang besar mengingat jumlah desa yang di Indonesia lebih dari 78 ribu. Biaya tersebut seperti biaya pengadaan perangkat keras (laptop atau komputer desktop) dan pelatihan bagi para aparatur desa. Selain itu, pemerintah juga memerlukan waktu yang cukup lama karena pemerintah harus memberikan edukasi tentang penggunaan kumputer serta edukasi sistem informasi tersebut.

Untuk melalui latar belakang tersebut, penulis menggagas sebuah solusi tentang pengembangan apalikasi sistem informasi pengelolaan keuangan yang khusus diperuntukkan dilingkungan pemerintahan desa. Aplikasi ini dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Aplikasi ini akan berjalan di sistem operasi terbuka (open source) "OS Android" sehingga aplikasi ini dikembangkan dengan *user interface*

yang mudah dioperasikan oleh pemerintah desa

Adapun rumusan masalah dalam penulisan *paper* ini antara lain : 1) bagaimana gambaran umum Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis OS Android; 2) Bagaimana fitur dan keunggulan Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKaDes) 1.0 Berbasis Android; 3) Bagaimana identifikasi dan analisis faktor-faktor internal dan eksternal dalam pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis OS Android; 4) Bagaimana aktiviasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKaDes) 1.0

Tujuan penulisan *paper* ini antara lain : 1) Untuk mengetahui gambaran umum Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis OS Android; 2) Untuk mengetahui fitur dan keunggulan Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKaDes) 1.0 Berbasis Android; 3) Untuk mengetahui identifikasi dan analisis faktor-faktor internal dan eksternal dalam pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis OS Android; 4) Untuk mengetahui aktiviasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKaDes) 1.0

TELAAH LITERATUR

A. Defenisi Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya.

Transparansi memungkinkan semua *stakeholders* dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan (pertanggungjawaban) periode yang lalu. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya. Konsep keadilan berarti bahwa masyarakat diperlakukan secara sama di bawah hukum, dan mempunyai derajat yang sama dalam partisipasi politik dalam pemerintahannya (Shende dan Bennett, 2004).

B. Kajian Tentang Dana Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Rencananya setiap desa akan mendapatkan dana maksimal sebesar 1,4 miliar rupiah. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pula bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) tahap I, pada bulan April sebesar 40%; 2) tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan 3) tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

C. Defenisi Sistem Informasi Keuangan

Sistem Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan & menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai diseluruh perusahaan. Model system informasi keuangan yaitu sub system input dan sub system output (Peter : 2008 : 70). Sistem Informasi Keuangan mempunyai tiga tugas pokok antara lain : 1) mengidentifikasi kebutuhan keuangan yang akan datang; 2) membantu perolehan dana tersebut; 3) mengontrol penggunaannya. (elearning.gunadarma.ac.id)

D. Defenisi Platform Android

Menurut Nazaruddin dalam Supriyono dan kawan-kawan (2014), Android adalah salah satu platform sistem operasi yang digemari masyarakat karena sifatnya yang *open source* sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan pengembangan. Android merupakan generasi baru *platform mobile* berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Arsitektur Android terdiri dari bagian-bagian seperti berikut : a) *Applications* dan *Widgets*: layer (lapisan) dimana pengguna hanya berhubungan dengan aplikasi saja; b) *Applications Framework*: lapisan dimana para pengembang melakukan pembuatan aplikasi yang akan dijalankan di

sistem operasi Android dengan komponen-komponennya meliputi *views, contents provider, resource manager, notification manager, activity manager*; c) *Libraries*: lapisan dimana fitur-fitur android berada yang berada diatas kernel meliputi library C/C++ inti seperti Libc dan SSL; d) *Android Run Time*: lapisan yang membuat aplikasi Android dapat dijalankan dimana dalam prosesnya menggunakan implementasi Linux yang terbagi menjadi dua bagian yaitu *Core Libraries* dan *Dalvik virtual Machine*; e) *Linux Kernel*: Layer yang berisi file-file system untuk mengatur *processing, memory, resource, driver*, dan sistem operasi android lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif, menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci. (Malhotra, 2015). Paradigma kualitatif menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci (Indiarto dan Bambang, 1999). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yaitu sumber data penulisan yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat

oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Indiarto dan Bambang, 1999).

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah : (1) Studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian; (2) Dokumenter, Studi dokumentasi dilakukan dengan jalan membaca laporan-laporan penulisan sebelumnya serta artikel yang diakses dari internet, buku maupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan. Pada metode ini penulis hanya memindahkan data yang relevan dari suatu sumber atau dokumen yang diperlukan; (3) Diskusi, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pembicaraan dan pertukaran pikiran dengan orang-orang yang berkompeten dengan obyek yang sedang diteliti guna memecahkan masalah tertentu; (4) Intuitif-Subjektif, merupakan melibatkan pendapat penulis atas masalah yang sedang dibahas (Abdul Ghofar, 1999). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memantu organsiasi dalam

mempertimbangkan secara hati-hati kapabilitas internal organisasi dan menggunakan hasilnya untuk membentuk pilihan strategis. Analisis SWOT pertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dimiliki organisasi. (Rangkuti, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis OS Android



Gambar 1. Logo SIKADES 1.0

Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 merupakan aplikasi terpadu berbasis android yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 dikembangkan berdasarkan peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang

Keuangan Desa yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bertanggungjawab.

SIKaDes 1.0 akan menjadi terobosan dalam mendukung reformasi birokrasi pengelolaan keuangan negara dalam hal ini dana desa. Aplikasi SIKaDes 1.0 bertujuan untuk melakukan perubahan mendasar terhadap tatakelola dana desa dari pengelolaan konvensional ke pengelolaan berbasis teknologi informasi. SIKaDes 1.0. Peranan SIKaDes 1.0 dalam mendukung reformasi birokrasi didasarkan pada 3 pilar utama yaitu : 1) Pilar Organisasi, yaitu mendorong apatur desa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa untuk senantiasa melakukan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya; 2) Pilar Bisnis penetapan standar laporan keuangan desa berbasis teknologi informasi 3) Pilar SDM, antara lain melalui peningkatan disiplin dan penataan sumber daya manusia dalam mengelolah keuangan dana desa

Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 fokus pada kegiatan akuntansi dan pelaporan yang mencakup pembuatan jurnal, buku Besar, buku Pembantu, dan laporan keuangan (laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca). Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 diperoleh secara

gratis oleh pemerintah desa. Untuk menggunakan aplikasi ini, setiap pemerintah desa diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu ke pemerintah daerah untuk mendapatkan kode aktivasi aplikasi. selain itu, diperlukan pula registrasi online untuk memuat informasi tentang desa tersebut.

Pengembangan Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 yang berjalan di platform android akan memudahkan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan karena : 1) perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan aplikasi ini bersifat mobile seperti smartphone ataupun komputer tablet (OS Androdi) yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dalam setiap melakukan kegiatan pelaksanaan seperti pencatatan transaksi dapat dilakukan secara *real time*. Selain itu harga perangkat keras OS Android cukup terjangkau baik *smartphone* maupun

tablet dan sangat mudah untuk digunakan serta telah menggunakan bahasa Indonesia, tentu aparatur desa akan lebih cepat dalam memahami teknis penggunaan SIKaDes 1.0 beserta perangkat kerasnya ; 2) *User Interface* yang dikembangkan dalam SIKaDes 1.0 didesain sedemikian rupa untuk memudahkan pengoprasiannya; 3) tidak harus terkoneksi dengan internet saat pengoprasian aplikasi ini seperti pencatatan transaksi; 4) memberikan efisiensi dalam melakukan penatausahaan seperti pencatatan transaksi yang kemudian dapat ditampilkan dalam bentuk kas umum, kas harian, neraca dan lain-lain; 5) pengendalian transaksi terjamin, cepat dan akurat dalam menghasilkan informasi keuangan desa.

B. Operasional Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis OS Android



Gambar 2. Flow Chart Operasional SIKADES 1.0

Berikut adalah proses proses input data dalam aplikasi Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0

Input transaksi keuangan terdiri atas dua yaitu input penerimaan dan input pengeluaran. Penerimaan dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD dicatat langsung oleh pemerintah desa ke aplikasi Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 saat serah terima uang. tujuan adalahnya agar dana tersebut langsung tercatat kedalam sistem SIKaDes 1.0. Sedangkan input pengeluaran adalah segala jenis pengeluaran yang menggunakan

dana desa. jenis pengeluaran tersebut seperti pembelian inventaris desa, biaya program dan lain-lain. saat proses transaksi pengeluaran, bendara desa langsung menginput jumlah pengeluaran, sehingga langsung terdata dalam sistem.

Proses pengelolaan data dalam aplikasi Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 terdiri dari beberapa proses yang disesuaikan dengan kebutuhan laporan dana desa. proses tersebut mencakup pembuatan jurnal, buku Besar, buku Pembantu, dan laporan keuangan. Adapun output dari aplikasi Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes)

1.0 terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan arus kas. Neraca serta Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

C. Identifikasi dan Analisis Faktor-Faktor Internal dan Eksternal dalam Pengembangan Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis OS Android

1. Faktor Strategis Internal

Faktor-faktor strategis internal terdiri dari faktor-faktor yang dapat dijadikan kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis OS Android. Berikut merupakan hasil identifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan yaitu,

a. Faktor Kekuatan :

- 1) Aplikasi berbasis *Open Source* : Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 dikembangkan secara khusus untuk *operating system* berbasis terbuka atau *open source* seperti Android. Sehingga aplikasi ini sangat kompatibel dengan perangkat *smartphone* atau *tablet* yang menggunakan OS Android. Pengembangan Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis Android akan sangat menguntungkan karena OS Android terbilang *familiar* di Indonesia karena banyaknya pengguna OS tersebut baik dalam bentuk *smartphone* maupun komputer *tablet*. Waiwai

Marketing (2015), Indonesia merupakan pengguna android di Indonesia terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah pengguna mencapai 41 juta atau 94% dari pangsa produk *smarthone* di Indonesia. Selain itu, Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 akan sangat mudah dikembangkan oleh pemerintah dengan menggandeng *developer* android karena bersifat *open source*.

- 2) *User friendly* : Aplikasi Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis Android dikembangkan untuk memudahkan perangkat desa khususnya bendahara dalam mengelola keuangan desa. aplikasi ini memiliki ragam fitur yang disesuaikan dengan peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014. Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis Android dirancang dengan *user interface* yang mudah digunakan oleh pengguna untuk menginput semua data keuangan kedalam aplikasi. selain itu, pengembangan Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis Android akan menggunakan perangkat yang mudah dibawa kemana-mana oleh penanggung jawab keuangan desa (*smartphone* ataupun *tablet*) dan bisa melaksanakan tugasnya seperti melakukan pencatatan transaksi keuangan dimana saja, kapan saja sehingga akan terimput kesistem secara *real time*.

3) Fitur Unggulan : Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis Android menawarkan beragam fitur yang memudahkan pengelolaan keuangan desa seperti transaksi, pembuatan laporan, penyimpanan data keuangan, hingga rekening desa. Beberapa fitur unggulan yang dikembangkan dalam dalam aplikasi ini antara lain : 1) konversi laporan seperti jurnal, buku besar, neraca, laporan bulanan ataupun laporan tahunan ke forma file word, excel dan pdf; 2) penyimpanan data dalam aplikasi ini terhubung akan terhubung dengan *cloud storage* sehingga data-data keuangan desa akan tersimpan dengan aman; 3) terintegrasi dengan SIMDA ataupun SIPKD

b. Faktor Kelemahan

1) Sumber Daya Manusia : salah satu tantangan dalam implementasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis Android adalah kesiapan sumber daya manusia desa untuk mengadopsi sistem ini kedalam pengelolaan keuangan desa. Berbagai permasalahan yang menjadi kelemahan adalah 1) tingkat pendidikan masyarakat desa yang terbilang rendah, sehingga pemahaman terhadap manajemen keuangan khususnya pembuatan jurnal, laporan keuangan masih terbilang rendah; 2) masyarakat desa masih tertinggal dalam hal

penggunaan teknologi informasi seperti penggunaan internet ataupun komputer.

2) Fasilitas Infrastruktur Teknologi dan Informasi : keterbatasan infrastruktur teknologi dan informasi seperti belum terkoneksi dengan internet, pengetahuan TIK, serta listrik akan menjadi penghambat dalam pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis Android.

2. Faktor Strategis Eksternal

Faktor-faktor strategis eksternal terdiri dari faktor-faktor yang dapat dijadikan peluang dan ancaman gagasan pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis OS Android. Berikut merupakan hasil identifikasi faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman, diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Peluang

1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) : saat ini pemerintah telah mengembangkan aplikasi sistem informasi keuangan daerah yang menjadi platform terpadu dan dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan

auditabel. SIPKD dan SIMDA yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data/informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.

- 2) Regulasi Pemerintah : Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa : Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat pasal yang membahas secara khusus pengembangan sistem informasi desa yaitu pasal 68. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem informasi desa mencakup data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem informasi ini

dikelolah oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Selain UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa. Peraturan ini telah menetapkan standar pelaporan keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa yaitu anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank dan laporan realisasi anggaran.

- 3) Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Negara : tata kelolah keuangan negara telah atur dalam UU dan peraturan pemerintah. Tujuan reformasi birokrasi (dalam tatakelolah keuangan) ada 4 antara lain Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan, Pemerintahan terbuka berbasis IT, Pemerintahan melayani dan partisipatif, dan SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif. Program Percepatan Reformasi Birokrasi dalam tatakelolah keuangan negara diwujudkan dalam pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem Informasi Manajemen Daerah. Sistem ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan

APBD dan pertanggungjawaban APBD.

b. Faktor Ancaman

- 1) Kehilangan Perangkat Keras dan Data : Kehilangan perangkat keras merupakan ancaman karena akan menghilangkan data-data keuangan yang terdapat dalam perangkat tersebut. Risiko kehilangan perangkat keras dalam hal ini smartphone atau tablet android yang digunakan oleh pemerintah pemerintah desa untuk menjalankan aplikasi ini sangatlah besar, karena perangkat

ini adalah perangkat mobile yang mudah berpindah tangan.

- 2) Penyalahgunaan Data : Risiko penyalahgunaan data dalam penggunaan aplikasi ini seperti adanya unsur kesengajaan dalam seperti *mark up* pada nilai nominal transaksi yang diimput dalam sistem.

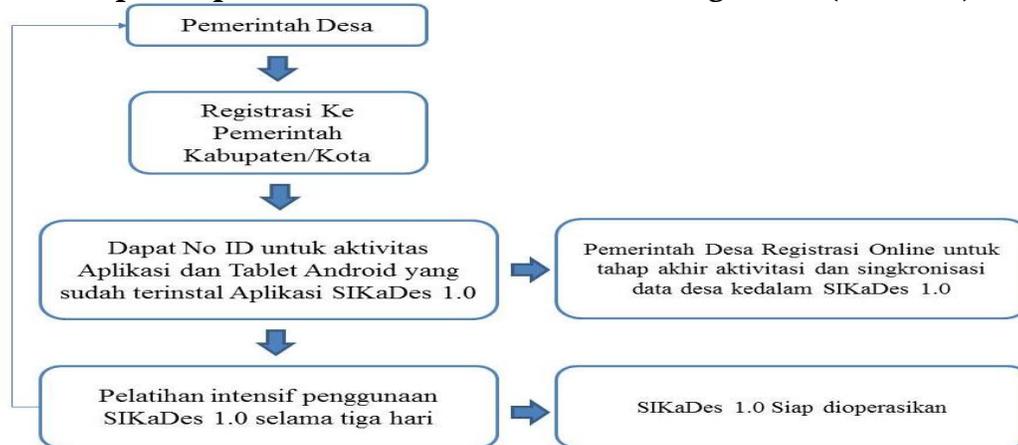
c. Matrix SWOT

Tabel 1. Matrix SWOT

MATRIX SWOT	<u>Kekuatan (S-Strengths)</u>	<u>Kelemahan (W-Weakness)</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi berbasis <i>Open Source</i> • <i>User friendly</i> • Fitur Unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia • Fasilitas Infrastruktur Teknologi dan Informasi
<p><u>Peluang (O-Opportunities)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) • Regulasi Pemerintah : Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam 	<p><u>Strategi S-O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan SIKaDes 1.0 dengan sistem informasi keuangan buatan pemerintah seperti SIPKD dan SIMDA melalui pengembangan website SIKaDes • Pengembangan SIKaDes 1.0 didasarkan pada standar pelaporan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sebagai upaya dalam mendukung percepatan program reformasi birokrasi ke 	<p><u>Strategi W-O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan intensif tentang SIKaDes kepada aparatur desa yang bertanggung jawab untuk mengelolah keuangan desa yang dilakukan selama 3 hari di ibukota kabupaten/kota • Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di desa-desa khususnya internet (internet masuk desa)

<p>Negeri No Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reformasi birokrasi pengelolaan keuangan negara 	<p>pemerintahan tingkat bawah (desa)</p>	
<p><u>Ancaman (T-Threats)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan Perangkat Keras dan Data • Penyalahgunaan Data 	<p><u>Strategi S-T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan SIKades 1.0 dengan <i>cloud stroge</i> seperti google cloud stroge atau Dropbox sebagai backup data keuangan dalam aplikasi • Mengembangkan sistem monitoring dan kontrol penggunaan aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD atau SIMDA yang bisa dipantau langsung oleh pemerintah daerah • Memberikan sanksi tegas kepada aparatur desa yang menyalahgunakan data keuangan 	<p><u>Strategi W-T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai sukses menerapkan SIKaDes dengan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku

D. Tahapan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKaDes) 1.0



Gambar 4. Diagram Alir Implementasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKaDes) 1.0

Tahap 1 :

Pemerintah pusat bekerjasama melakukan sosialisasi SIKaDes 1.0 keseluruhan perwakilan aparatur desa dengan mengundang pemerintah daerah dan akademisi. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan SIKaDes kepada aparat desa sebagai sistem informasi keuangan untuk pengelolaan dana desa.

Tahap 2

Setiap pemerintah desa akan melakukan registrasi ke pemerintah kabupaten untuk mendapatkan tablet android yang telah terinstal aplikasi SIKaDes 1.0 dan memperoleh kode aktivasi aplikasi SIKaDes 1.0. Pemerintah desa melakukan registrasi online yang mencakup : nama desa, alamat dan kontak. Setelah

itu, pemerintah desa memasukkan kode aktivasi SIKaDes 1.0 untuk mendapatkan ID Aplikasi.

Tahap 3

Perwakilan aparatur pemerintah desa dalam hal ini bendahara atau bagian keuangan akan melakukan pelatihan intensif tentang operasional SIKaDes 1.0 dan pedoman tatakelola dana desa selama 1 minggu di ibu kota kabupaten atau provinsi. Pelatihan ini mendatangkan tim pengembang SIKades yaitu pemerintah pusat dan akademisi.

Tahap 4

Penggunaan aplikasi saat Musrenbang Desa yang melibatkan perwakilan masyarakat, aparatur pemerintah desa, dan aparat pemerintah kabupaten. Sistem Informasi Keuangan

Desa (SIKaDes) 1.0 akan mencatat seluruh hasil rincian anggaran kesepakatan rencana kerja pembangunan desa. Output Musrembang Desa dalam SIKaDes 1.0 adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang di unggah di *cloud stroge*.

KESIMPULAN

Dana desa sangat rentang disalahgunakan oleh aparat desa yang tidak bertanggungjawab. Perilaku oknum aparat desa yang tidak bertanggungjawab tersebut akan menjadi penghambat dalam mendorong kemajuan pembangunan desa. Sehingga tujuan dari dana desa tidak akan dapat terwujud dan masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap pemerintah. Untuk pemerintah telah mewajibkan seluruh penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang sudah diatur dalam undang undang dan peraturan pemerintah. Namun, pemerintah desa masih memiliki kendala membuat laporan keuangan karena keterbatasan sumber daya manusia khususnya yang memahami standar akuntansi pemerintah. Keberadaan Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 akan membantu pemerintah dalam mengawasi penggunaan dana desa. Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 akan memudahkan aparat desa dalam membuat

laporan keuangan penggunaan dana desa. setiap transaksi keuangan dana desa akan tercatat dalam sistem SIKaDes 1.0 secara *real time*. Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 juga dirancang dengan sistem keamanan yang mumpuni dan sewaktu-waktu dapat dilacak oleh pemerintah pusat atau daerah untuk keperluan penyelidikan jika terindikasi adanya penyelewengan. Output Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 adalah menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berdasarkan peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.

Agar gagasan ini dapat diadopsi dan dipraktekkan di lapangan dibutuhkan sosialisasi kepada semua pihak yang terlibat dan uji coba di lapangan, untuk mengusaha keberhasilan gagasan. Agar pelaksanaan program ini sukses, perlu adanya kesepahaman dan komitmen yang kuat antara semua pihak yang terlibat. Beberapa cara untuk membangun kesepahaman dan komitmen itu diantaranya adalah melakukan hal sebagai berikut : 1) Sering melakukan musyawarah dan koordinasi untuk menentukan kebijakan arah gerak dari program ini; 2) Dibuatnya MoU diantara pihak-pihak yang terlibat, dimana didalamnya tertuang poin-poin kesepakatan yang harus dijalankan dan dipatuhi bersama; 3) Perlunya diadakan evaluasi pelaksanaan program ini oleh

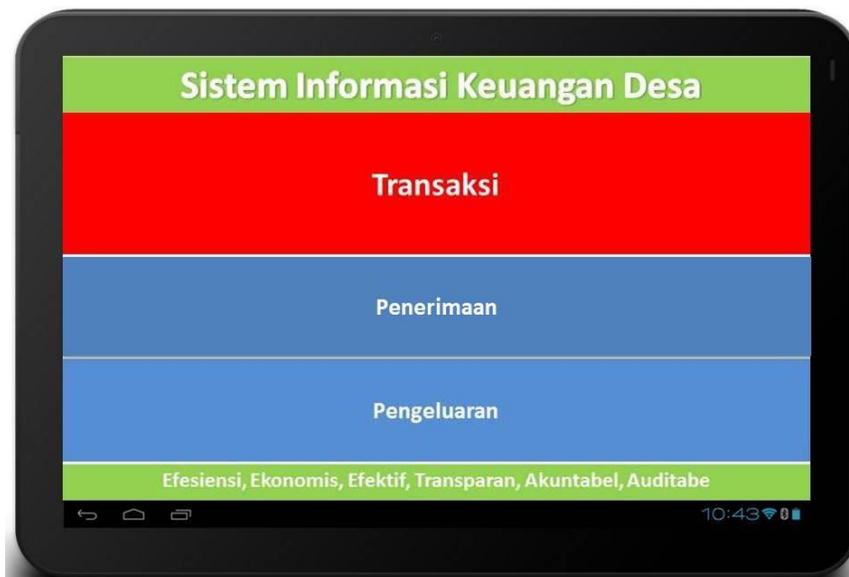
berbagai pihak yang terlibat. Agar dapat diadakan perbaikan terus menerus pada berbagai aspek kegiatan yang masih dirasa kredit usaha yang memerlukan pembenahan.

DAFTAR RUJUKAN

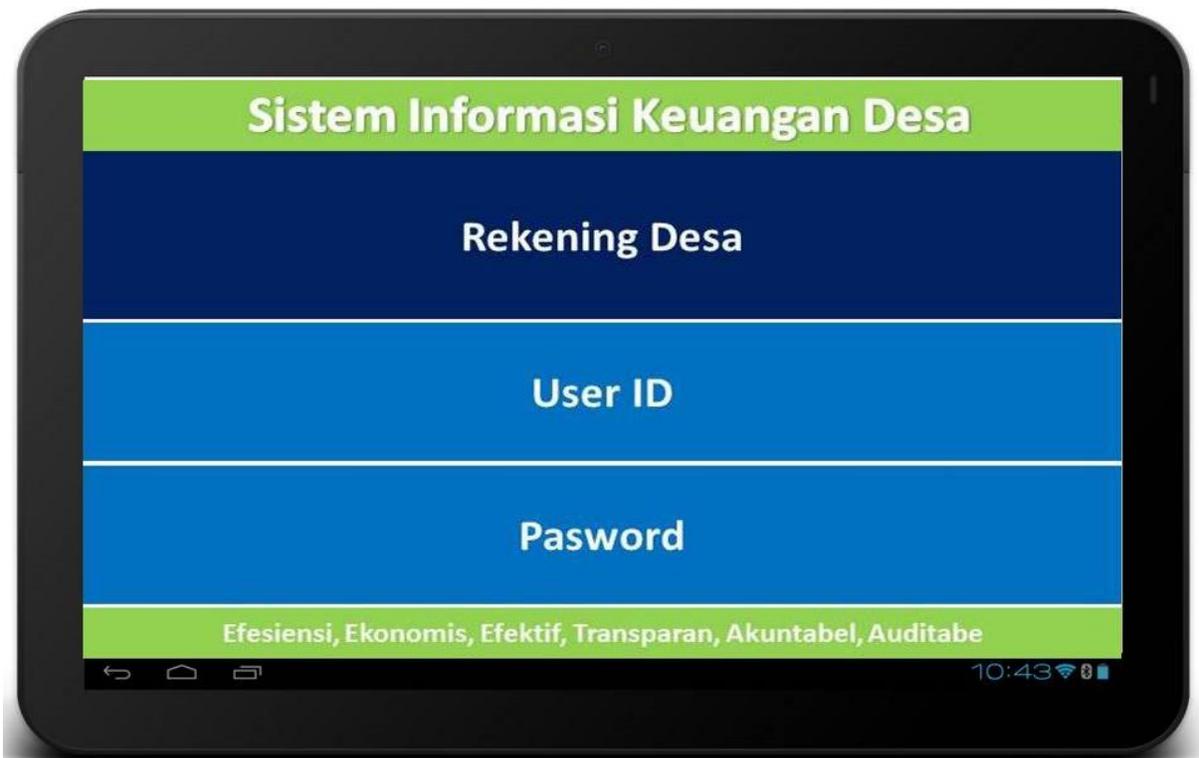
- Budiriyanto, Eko. 2013. Kajian Legal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) : Disharmonisasi Peraturan Perundangan. (online) http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/385/Kajian_Legal_SIKD_Ekobudi_Versi2.pdf, diakses pada 05 Agustus 2018
- Departemen Keuangan. 2004. *Menata Keuangan Negara Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta : Departemen Keuangan
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta : Kompas Gramedia
- Ghofar, Abdul. 1999. *Analisis Implikasi Pemikiran dan Penafsiran Akuntansi dari Paradigma Mainstream Barat dan Paradigma Islam dalam Kerangka Analisis Konsep TAO (Studi Kualitatif Komparatif Akuntansi Mainstream dan Akuntansi Alternatif dalam Pembentukan Akuntansi Humanis*. Skripsi (S1). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Indiarto, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Reformasi Birokrasi*. (online) <https://www.menpan.go.id/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan>, diakses 06 Agustus 2018
- Junaidi. 2015. Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa di Indonesia. *Jurnal Neo-Bis* Vol 9 No 1, hal. 40
- Moeloeng, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, Harmadhani Adi dan Yuli Widi Astuti. 2013. Analisis Penerapan Sistem Informasimanajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Akuntansi Aktual* Vol 2 No 1, hal. 26
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peter. 2008. Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi dengan Dukungan Sistem Pengambilan Keputusan (DSS) dalam Organisasi. *Jurnal Manajemen*, Vol.8, No. 1, hal. 70
- Samin, Rumzi. 2011. Reformasi Birokrasi. *Jurnal FISIP UMRAH*, Vol. 2, No. 2. Hal 172
- Setjen DPR RI. 2014. Dana Desa: Alokasi Dan Potensi Inefektivitasnya. (online) http://www.dpr.go.id/doks/etjen/dokumen/apbn_DAN_A_DESA-_ALOKASI_DAN_POTENSI_INEFEKTIVITASNYA_20150129095337.pdf, diakses 05 Agustus 2018
- Shende, Suresh dan Tony Bennett. 2004. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA. <http://www.unpan.org>
- Supriyono, Heru et all. 2014. Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Hadis untuk Perangkat Mobile Berbasis Android. *Jurnal Informatika* Vol. 8, No. 2, Hal 910
- Suwarjeni, V. Wiratma. Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Pustaka Baru Press : Yogyakarta
- Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Desa*. Tugas akhir tidak diterbitkan, Yogyakarta : Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
- Tim Penulis Universitas Negeri Malang 2000. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian, Artikel, dan Makalah*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Waiwai Marketing. 2015. *The Number of Mobile Phones in Southeast Asia in Q2 2015*. (online) <https://e27.co/infographic-android-dominates-southeast-asia-smartphones-20151026/>, diakses 06 Agustus 2018

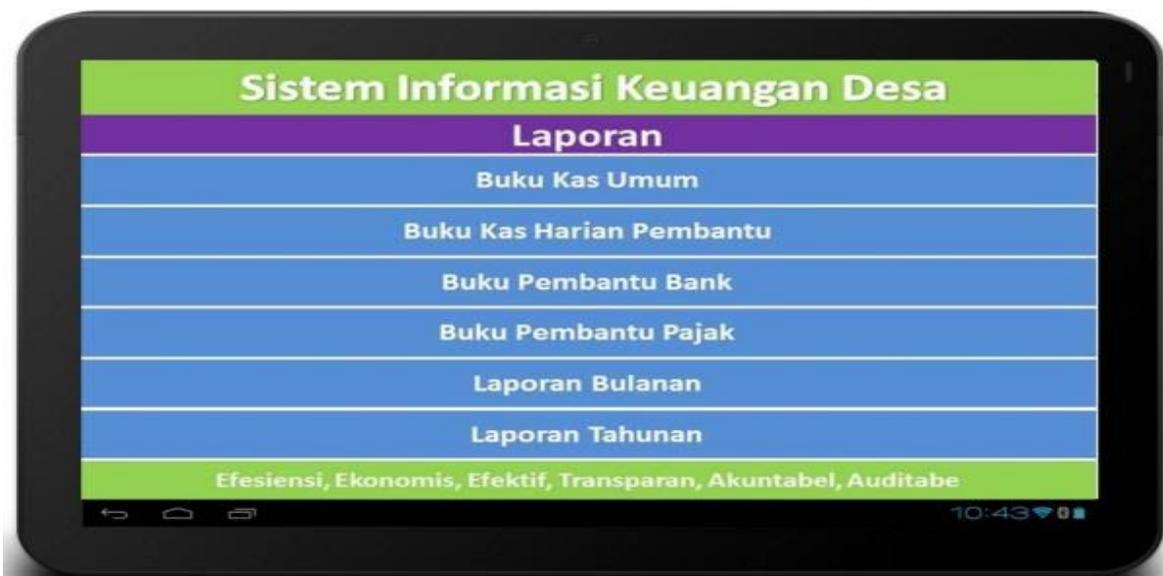
LAMPIRAN UI SIKADES 1.0



UI Menu Transaksi Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0



UI Menu Rekening Desa Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0



Buku Pembantu Bank
Desa X
Januari Tahun Anggaran 2016

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
01-Jan-2016		Saldo Kas per 1 Jan 2016			30.000.000
11-Jan-2016		Mencatat setoran ke bank	5.000.000		35.000.000
14-Jan-2016		Pencairan SPP No. 001		2.000.000	33.000.000
20-Jan-2015		Pencairan SPP No. 002	20.000.000		13.000.000
30-Jan-2015		Alokasi Dana Desa	30.000.000		43.000.000

Konversi Ke

- Excel Document
- Word Document
- PDF
- Word Document ▼

10:43

Buku Kas Umum
Desa X
Januari Tahun Anggaran 2016

No	Tanggal	Nama Akun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	01-Jan-2016	Saldo Kas per 1 Jan 2016			30.000.000
2	05-Jan-2016	Penerimaan CSR Pembangunan PT X	10.000.000		40.000.000
	08-Jan-2016	Belanja ATK		500.000	39.500.000
	10-Jan-2015	Renovasi Kantor Desa		20.000.000	19.500.000
	15-Jan-2015	Bayar Listrik, Air dan Telepon		1.500.000	18.000.000
	28-Jan-2015	Bayar Honorarium		3.000.000	15.000.000
	30-Jan-2015	Alokasi Dana Desa	30.000.000		45.000.000

Konversi Ke

- Word Document ▼

10:43

Buku Kas Umum